

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Menurut UUD Republik Indonesia No. 4 tahun 1997 Pasal 5 tentang penyandang cacat, penyandang Cacat Fisik adalah kecacatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi tubuh, antara lain gerak tubuh, penglihatan, pendengaran, dan kemampuan bicara (Nomor, 1998). Sebelumnya, istilah dalam pemanggilan kata penyandang cacat, tetapi karena memiliki makna atau pemahaman yang kurang baik ini membuat mereka merasa dikucilkan atau tidak sederajat dengan lainnya. Hal ini membuat istilah baru yaitu penyandang disabilitas (Utami et al., 2018). Penyandang disabilitas seseorang yang mengalami kelainan fisik dan atau mental yang mengganggu dalam melakukan banyak kegiatan pada umumnya. Penyandang disabilitas terbagi menjadi tiga kelompok, yaitu penyandang disabilitas fisik, penyandang disabilitas mental, dan penyandang disabilitas ganda (fisik dan mental). Terdapat sekelompok warga negara yang semestinya memiliki hak yang sama dalam berbagai aspek kehidupan adalah penyandang disabilitas atau dapat dikenal dengan penyandang difabel (Tim Penyusunan ASB Indonesia, 2006).

Penyandang disabilitas ini dapat terbagi menjadi 2 kategori yaitu disabilitas ringan dan berat. Penyandang disabilitas ringan adalah seseorang yang mengalami kendala seperti gangguan atau kesulitan minimal satu jenis disabilitas dengan tingkat kesulitan ringan dan tidak mengalami tingkat kesulitan berat. Namun penyandang disabilitas berat adalah seseorang yang mengalami kendala seperti gangguan atau kesulitan minimal satu jenis disabilitas dengan tingkat kesulitan berat (K.Fatwa et al., 2019).

Istilah dari penyandang disabilitas yang memiliki kelainan fisik, mental, perilaku, atau sosial. Definisi dari *difable* sendiri adalah mereka yang mengalami disabilitas tetapi tetap dapat melakukan kegiatan dengan cara yang berbeda. Kondisi ini yang dapat menyebabkan hambatan atau keterbatasan dalam beraktivitas sehari-hari sehingga diperlukan kebutuhan khusus. Kata difabel adalah

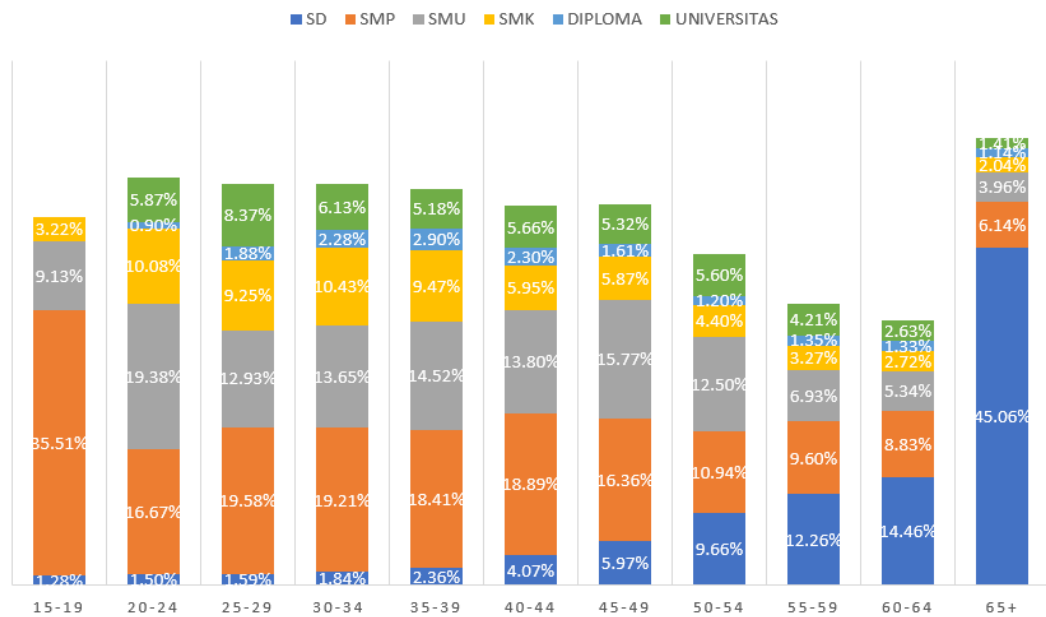
sebuah sinonim dari Different Ability People atau orang dengan kemampuan yang berbeda (Hapsari, 2011).

Penyandang disabilitas di Indonesia, sampai saat ini mengalami diskriminasi pada berbagai bidang. Masyarakat sebagai warga negara Indonesia juga diharapkan untuk menghapus diskriminasi kepada penyandang disabilitas. Menurut Gudroni Sakaril sebagai Ketua Umum Persatuan Penyandang Disabilitas pada tahun 2013, mengatakan bahwa terdapat beberapa diskriminasi yang terjadi hingga saat ini, dan penyandang disabilitas ini juga belum dapat disetarakan dengan non-disabilitas. Hak yang seharusnya didapatkan oleh para penyandang disabilitas seperti mengakses sebuah fasilitas publik seperti transportasi umum, atau sekedar ingin beribadah ini juga belum memiliki kemudahan (Rikin, n.d.).

Namun, penyandang disabilitas tetap menemui dan harus menghadapi berbagai tindakan diskriminasi, dimana dapat memberikan efek secara jasmani dan rohani terhadap seseorang. Syarat sehat jasmani dan rohani merupakan salah satu syarat yang harus dimiliki setiap orang. Terdapat beberapa paradigma yang diciptakan oleh masyarakat tentang para penyandang disabilitas seperti ketidakmampuan seseorang secara medis, sehingga sering kali dianggap tidak mampu dalam mengikuti pendidikan, atau bekerja secara normal. Sekelompok penyandang disabilitas pernah mengatakan hanya bisa berpasrah dari kehendak Tuhan dan selalu dianggap sebagai orang yang tidak beruntung dalam menghadapi kondisi tersebut. (Hamidi, 2016)

Dengan minimnya atau keterbatasan aksesibilitas di area penyandang disabilitas ini membuat jurang pemisah antara penyandang disabilitas dengan non-disabilitas. Kondisi ini membuat permasalahan utama yang dihadapi penyandang disabilitas adalah keterbatasan dalam mengakses pelayanan pendidikan, transportasi, kesehatan dan politik atau juga keadilan (Herlina, 2014).

## PENYANDANG DISABILITAS TINGKAT PENDIDIKAN - UMUR

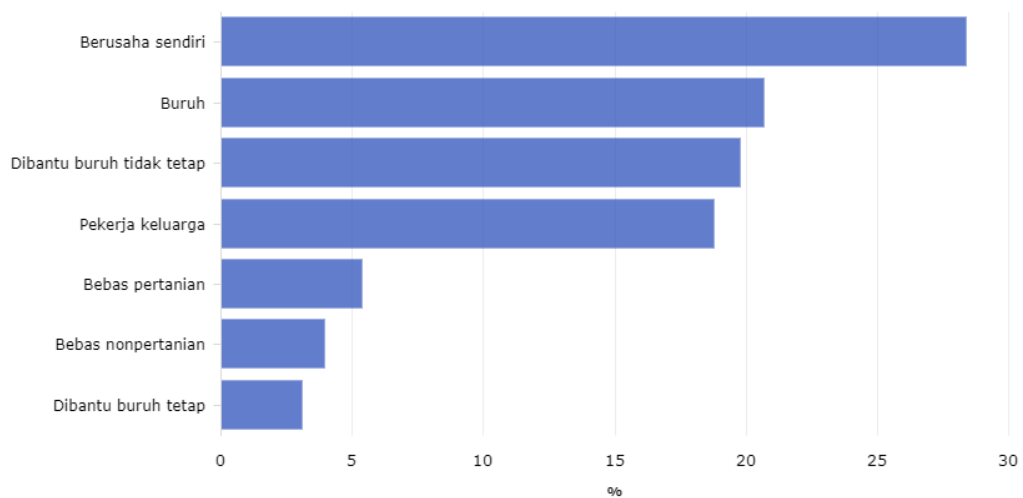


Gambar 1. Data penyandang disabilitas, tingkat Pendidikan, dan umur

Sumber : BPS, Sakernas Agustus 2018 diolah Pusdatinaker

Berdasarkan data sarkernas periode tahun 2018 (BPS) menemukan fakta bahwa penyandang disabilitas di Indonesia memiliki latar belakang Pendidikan SD ke bawah sebanyak 72 persen. Hal ini dikarenakan sulitnya para penyandang disabilitas dalam mengakses Pendidikan di beberapa tahun yang lalu yang membuat mereka tidak dapat melanjutkan sekolah atau bersekolah seperti orang non-disabilitas. Ini terlihat pada kelompok Pendidikan SMP, dimana didominasi dari usia muda dengan sekitar 52,18 persen, sedangkan penyandang disabilitas dengan usia produktif tingkat SMA atau SMK ke atas lebih rendah. (K.Fatwa et al., 2019)

Tingkat pendidikan ini juga sangat mempengaruhi presentase dalam tingkat kemandirian atau kesulitan dalam beraktivitas bagi penyandang disabilitas. Jika tingkat pendidikan semakin tinggi maka semakin tinggi juga tingkat kemandirian dan berkurangnya tingkat kesulitan dalam beraktivitas, dan begitu sebaliknya (Jayani, 2020)

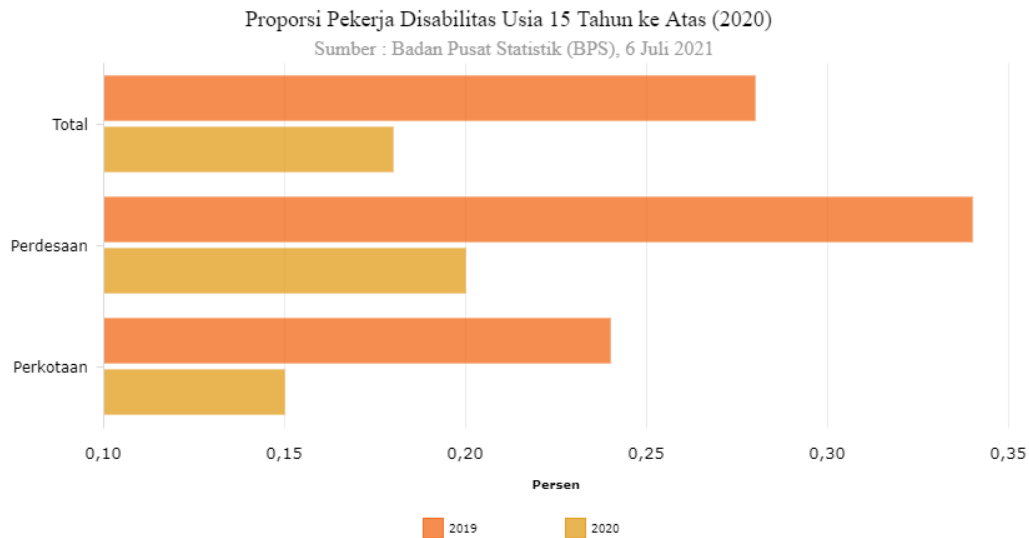


Gambar 2. Data penduduk bekerja dengan disabilitas menurut status pekerjaan 2020

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS)

Menurut gambar 1.1 grafik menunjukkan bahwa sekitar 28,37% pekerja disabilitas berusaha sendiri di tahun 2020. Dan hanya sekitar 19,97% pekerja disabilitas berusaha dengan menjadi buruh tidak tetap. Data tersebut menjelaskan bahwa para penyandang disabilitas ini sudah bekerja dengan berusaha sendiri atau melakukan usaha sendiri. (Rizaty, 2021)

Pada tahun 2018 mayoritas penyandang disabilitas yang bekerja sebagai pekerja mandiri sekitar 54,24 persen, dimana termasuk dalam penyandang disabilitas yang bekerja dengan berusaha sendiri sekitar 27,77 persen dan berstatus buruh tidak tetap atau tidak dibayar sekitar 26,47 persen. Sedangkan penyandang disabilitas yang bekerja sebagai buruh atau karyawan (pegawai) hanya sekitar 20,96 persen. Mayoritas penyandang disabilitas lebih memilih untuk berusaha sendiri dikarenakan mudahnya pelaksanaannya dari pada melamar pekerjaan ke perusahaan atau bergantung kepada pemberi kerja. Hal ini didukung dengan adanya persaingan antara non-disabilitas yang ketat dalam perekrutan dari perusahaan yang tidak dapat dihindarkan. Dengan berusaha mandiri juga tidak terikat dengan lama waktu kerja dan dapat disesuaikan dengan kemampuan sehingga memudahkan para penyandang disabilitas dalam bekerja. (K.Fatwa et al., 2019).



Katadata

databoks

Gambar 3. Data Pekerja Disabilitas usia 15 tahun ke atas  
Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS)

Badan Pusat Statistik mencatat bahwa penduduk di usia 15 tahun keatas dengan disabilitas yang bekerja hanya terdapat sekitar 0,18% pada tahun 2020. Angka mengalami penurunan di sekitar 0,28%. Persentase berdasarkan wilayah pekerjaan disabilitas di perkotaan menurun dari 0,24% menjadi 0,15% sedangkan di perdesaan hanya menurun dari 0,34% menjadi 0,20%.

Namun pekerjaan disabilitas dengan status bebas di pertanian lebih stabil dengan persentase sekitar 5,36%. Pekerja disabilitas yang berusaha dengan dibantu buruh tetap sekitar 3,08%. Sedangkan, yang berstatus bebas bukan pada sektor pertanian hanya mencapai persentase sekitar 3,96%.(Jayani, n.d.)

Jumlah penyandang disabilitas dengan usia di atas 15 tahun yang terhitung sampai Agustus 2018 ini terdapat sekitar 20,6 juta orang atau sekitar 11 persen dari total penduduk usia kerja di Indonesia. Untuk para penyandang disabilitas dengan kategori ringan terdapat sekitar 9,01 persen, sedangkan untuk para penyandang disabilitas dengan kategori berat hanya sekitar 1,56% di Indonesia. Sebanyak dari 50% penyandang disabilitas ini berasal dari Pulau Jawa, dengan persentase untuk penduduk yang berusia produktif (25-59 tahun) terdapat sekitar 45%(K.Fatwa et al., 2019).

Terdapat 3 daerah dengan nilai tingkat pengangguran terbuka penyandang disabilitas tertinggi adalah Provinsi DKI Jakarta sebanyak 5,24 persen, Kalimantan Utara sebanyak 4,66 persen, dan Banten sebanyak 4,58 persen. Dalam hal ini pemerintah setempat berperan penting dalam melakukan beberapa upaya untuk menangani permasalahan ini, seperti pemberian motivasi dalam meningkatkan kepercayaan diri, atau dapat berbentuk seperti pelatihan ketenagakerjaan yang disesuaikan dengan kemampuan penyandang disabilitas. Upaya ini diharapkan agar para penyandang disabilitas juga mampu bersaing dalam pasar kerja, sehingga permasalahan tingkat pengangguran terbuka ini dapat berkurang. (K.Fatwa et al., 2019)

Keberpihakan terhadap para penyandang disabilitas dengan adanya penerbitan Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas pada pasal 8 menjelaskan bahwa penyandang disabilitas juga berhak dalam kesetaraan atau kesamaan kesempatan dalam kemudahan sebuah aksesibilitas (*UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2016*, 2016). Perancangan fasilitas-fasilitas yang ramah untuk semua akan terbagi dalam dua hal yaitu mobilitas dan aksesibilitas. Prinsip dalam perancangan mobilitas dan aksesibilitas ini dapat memberikan kesempatan yang sama dalam mencapai, atau masuk ke sebuah tempat serta para pengguna dapat menggunakan fasilitas yang ada tanpa menjadi sebuah objek belas kasihan(Wicaksono, 2020).

Creative Hub merupakan wadah, secara fisik maupun virtual yang menyatukan pelaku kreatif yang sebagai wadah yang menyediakan ruang dalam menjalin hubungan, dalam bisnis dan partisipasi masyarakat dalam sektor ekonomi kreatif, teknologi dan budaya (Matheson & Easson, 2015)

Pada saat ini di Indonesia, sedang mengembangkan ekonomi kreatif yang sangat besar berpengaruh terhadap kemajuan industri. Dalam ekonomi kreatif ini menghasilkan karya seperti seni, musik, fashion, dan periklanan sehingga dapat menumbuhkan perekonomian di Indonesia. Oleh karena itu, pentingnya untuk mengenali kelebihan yang dimiliki sehingga dapat menyusun langkah-langkah aksi yang konstruktif. (Suryana, 2013)

Terdapat banyak permasalahan yang dihadapi oleh para penyandang disabilitas difabel, dimana permasalahan utama terdapat pada keterbatasan

aksesibilitas terhadap pelayanan pendidikan, pekerjaan, kesehatan, transportasi, dan partisipasi politik atau keadilan. Para penyandang disabilitas difabel sering mengalami hambatan untuk dapat berpartisipasi dalam setiap aspek kehidupan bermasyarakat. Dalam hambatan ini terjadi, baik karena lingkungan fisik, teknologi informasi, komunikasi, legislasi dan kebijakan yang belum sepenuhnya berpihak. Hal ini terjadi dikarenakan diskriminasi dan sikap dari masyarakat terhadap penyandang disabilitas. Oleh karena itu, menjadi sebuah stigma sosial dan paradigma “ruang gelap” tentang penyandang disabilitas yang terbangun di dalam masyarakat. Sebagian besar penyandang disabilitas difabel sering dipandang sebelah mata karena keterbatasan yang dimiliki. Di sebelah sisi, penyandang disabilitas difabel tidak dapat disamakan dengan orang yang memiliki kelengkapan dan kesehatan fisik, akan tetapi di sisi lain, hal ini tidak berarti mereka tidak memiliki kemampuan untuk menjadi bagian dalam kehidupan bermasyarakat sejajar dengan orang yang tidak termasuk dalam golongan penyandang disabilitas (K.Fatwa et al., 2019).

Aksesibilitas adalah masalah yang cukup penting di dunia ini, dikarenakan tidak adanya aksesibilitas menyebabkan seseorang kesulitan dalam bergerak ke tempat lain secara mandiri. Terlebih untuk para penyandang disabilitas aksesibilitas sebuah tempat sangat penting untuk dapat melangsungkan hidup mereka. Selama ini perbedaan kesetaraan dalam mengakses ke dalam bangunan sudah dibedakan, sehingga diketahui bahwa mereka berkebutuhan khusus, dan menciptakan deskriminasi karena berbeda dari normal (Elnokaly, 2016).

Berdasarkan data yang dijabarkan, perlu adanya perancangan Creative-Hub ini dilakukan agar para penyandang disabilitas atau khususnya difabel ini memiliki kesempatan yang lebih besar lagi agar dapat mengembangkan bakatnya, atau dapat hidup menjadi lebih mandiri. Perancangan Creative-Hub ini dilakukan dalam bertujuan untuk memperkuat, membuat dan menyelesaikan permasalahan yang ada, sehingga dapat meningkatkan pemberdayaan, dan hak-hak yang seharusnya didapatkan. Untuk memenuhi perancangan creative hub ini menggunakan konsep pendekatan arsitektur Inklusi. Arsitektur Inklusi atau Inklusif dapat dikatakan sebagai pendekatan pada desain universal. Desain Universal adalah pendekatan desain yang membuat fasilitas ataupun produk yang dapat digunakan oleh semua

pengguna secara umum, tanpa adanya batasan seperti fisik, usia dan juga jenis kelamin. Pendekatan desain ini juga dapat membuat suatu fasilitas yang akan menjadi jalan tengah atau toleransi antar satu sama lain sehingga para pengguna dapat menggunakannya dalam kegiatan beraktivitas, tanpa mengistimewakan sebagian orang. Dengan adanya desain universal, secara tidak langsung dapat mempermudah semua pengguna tanpa terkecuali dan dapat meningkatkan produktivitas pengguna sehingga dapat menghasilkan sebuah karya tanpa terhalang oleh usia ataupun fisik. (Yusita, 2008)

## **1.2. Identifikasi Masalah**

Kurangnya tempat atau wadah dimana para penyandang disabilitas ini dapat meningkatkan dan mengembangkan ide dari usaha mandiri yang akan menjadi salah satu dari ekonomi kreatif di Jakarta ini. Selain itu, para penyandang disabilitas kurang dalam mendapatkan akses dalam penggunaan pelayanan publik sehingga terjadi ketidaksetaraan.

## **1.3. Pertanyaan penelitian**

Adapun pertanyaan penelitian dari beberapa masalah yang telah dijabarkan dan perlu diselesaikan, antara lain:

1. Bagaimana merancang *Creative Hub* yang mewadahi pengembangan pelaku kreatif, *meet-up start-up*, *event-event*, pelatihan sementara, dan marketing untuk pelaku kreatif yang sesuai dengan kriteria perancangan untuk para penyandang tuna daksa atau disabilitas dengan pendekatan arsitektur inklusi?
2. Bagaimana mengolah tata ruang dalam sehingga dapat meningkatkan kreativitas pelaku kreatif untuk pengembangan ide, dan keterampilan yang nyaman untuk para penyandang tuna daksa atau difabel dengan pendekatan arsitektur inklusi?

## **1.4. Tujuan Perancangan**

Adapun beberapa tujuan penelitian, antara lain:

1. Merancang *Creative Hub* yang sesuai dengan standar kriteria perancangan peraturan pemerintah untuk para penyandang tuna daksa atau disabilitas



sebagai wadah pengembangan pelaku kreatif, *meet-up start-up*, *event-event*, pelatihan sementara dan juga marketing untuk pelaku kreatif dengan prinsip perancangan desain arsitektur inklusi.

2. Merancang tata ruang dalam sehingga dapat meningkatkan kreativitas pelaku kreatif untuk pengembangan ide, dan keterampilan yang nyaman untuk para penyandang tuna daksa atau difabel dengan pendekatan arsitektur inklusi.

### **1.5. Manfaat Perancangan**

Manfaat dari perancangan ini adalah diharapkan dapat menjadi ide desain dalam perancangan creative hub yang ramah bagi para penyandang disabilitas dengan pendekatan arsitektur desain inklusi. Sehingga penyandang disabilitas dapat melakukan aktivitas atau kegiatan ekonomi kreatif tanpa adanya hambatan seperti aksesibilitas, pandangan sosial, dan masalah lainnya. Selain itu juga dapat meningkatkan tingkat kemandirian para penyandang disabilitas dalam melakukan usaha baru secara mandiri sesuai dengan kelebihan dan bakat masing-masing.

### **1.6. Metodologi**

Metode penelitian ini menggunakan dengan metode penelitian kualitatif. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode kuantitatif dengan melakukan observasi langsung di Jakarta Creative Hub, dengan dokumentasi foto, dan wawancara dengan manager Kak Ulfa Khairunnisa Jakarta *Creative Hub*, Bapak Agoes YPAC Jakarta. Hasil dari penelitian dengan mengamati objek penelitian langsung di lapangan dengan menggunakan metode kualitatif secara deskriptif. Sumber data primer adalah sumber data yang dilakukan dengan pengamatan secara langsung serta mendokumentasikannya Sedangkan sumber data sekunder berasal dari studi literatur berupa standar ketentuan (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 16 Tahun 2021), Neufert, dan beberapa kajian literatur lainnya yang berhubungan dengan Creative-hub, aksesibilitas, dan desain inklusi khusus disabilitas (Wicaksono, 2020).

### **1.7. Ruang lingkup dan Batasan**

Projek yang dilakukan adalah Creative Hub yang ramah disabilitas difabel dengan pendekatan yang diusulkan adalah pendekatan Arsitektur Inklusi karena perancangan bangunan yang penggunaannya memiliki perilaku dan karakter khusus, agar dapat menentukan elemen-elemen apa saja yang harus diterapkan agar menciptakan kenyamanan bagi pengguna. Projek ini dilakukan dengan pengumpulan data dari studi kasus desain inklusi seperti Jakarta Creative Hub, Bandung Creative Hub, Guggenheim Museum yang menerapkan desain inklusi.

### **1.8. Nilai Kebaruan**

Nilai Kebaruan dalam Tugas Akhir ini adalah penggunaan pendekatan arsitektur inklusi pada *creative hub* dengan membuat desain yang dapat digunakan oleh semua orang khususnya disabilitas sehingga *creative hub* ini tidak memiliki batasan apapun. Penelitian ini menghasilkan nilai kebaruannya dalam perancangan *Creative Hub* dengan menggunakan desain inklusi sehingga dapat mengurangi kesenjangan antara para penyandang disabilitas difabel dan non-disabilitas.

### **1.9. Sitematika Penulisan**

Sistematika Penulisan digunakan untuk mempermudah dalam penyusunan karya ilmiah ini. Pada sistematika penelitian ini terbagi menjadi 5 bagian :

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab pertama ini akan membahas mengenai latar belakang masalah tentang tingkat kemandirian para penyandang disabilitas yang cukup besar dan hambatan-hambatan yang dialami oleh para penyandang disabilitas dalam mengakses sebuah bangunan ataupun dalam mengakses pendidikan, tujuan perancangan, manfaat penelitian untuk dapat menjadi sebuah wadah dimana para penyandang disabilitas dapat bebas dalam melakukan kegiatan ekonomi kreatif, nilai kebaruan dapat membuka lapangan kerja baru dan juga memperbanyak pelatihan pekerjaan sehingga menambahkan skill kepada para penyandang disabilitas.

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab kedua ini akan membahas mengenai teori yang berhubungan dengan perancangan yang akan dilakukan. Teori ini terbagi menjadi dua yaitu teori arsitektur seperti kebutuhan ruang dalam *Creative-Hub* dan menggunakan standar-standar aksesibilitas dari Peraturan PERMEN no 30/PRT/M/2006, Peraturan dan *neufert. Creative Hub*. Sedangkan teori non-arsitektur membahas tentang penyandang disabilitas difabel.

## BAB III METODOLOGI PENELITIAN DAN PERANCANGAN

Pada bab ketiga ini akan membahas mengenai metode kuantitatif dan kualitatif yang digunakan penulis dalam karya ilmiah ini, seperti membahas subjek dan objek penelitian, dan membahas teknik yang digunakan dalam pengumpulan data.

## BAB IV ANALISIS

Pada bab keempat ini akan menjelaskan hasil tentang paparan dalam penelitian, seperti analisa studi kasus seperti Jakarta Creative Hub, Bandung Creative Hub, Guggenheim Museum, observasi lapangan yang berkaitan dengan kajian teori, observasi data tapak, dan kriteria perancangan secara lingkungan, bangunan, dan ruang.

## BAB V SIMULASI PERANCANGAN

Pada bab kelima ini akan membahas tentang penyusunan konsep, strategi perancangan berdasarkan data yang telah dijabarkan sebelumnya dalam Perancangan Creative-Hub khusus penyandang disabilitas dengan pendekatan arsitektur inklusi .

## BAB VI KESIMPULAN

Pada bab terakhir ini akan membahas tentang kesimpulan dan saran dari keseluruhan penelitian yang telah dilakukan penulis dalam Perancangan Creative-Hub khusus penyandang disabilitas dengan pendekatan arsitektur inklusi.

## 1.10. Skema Berpikir

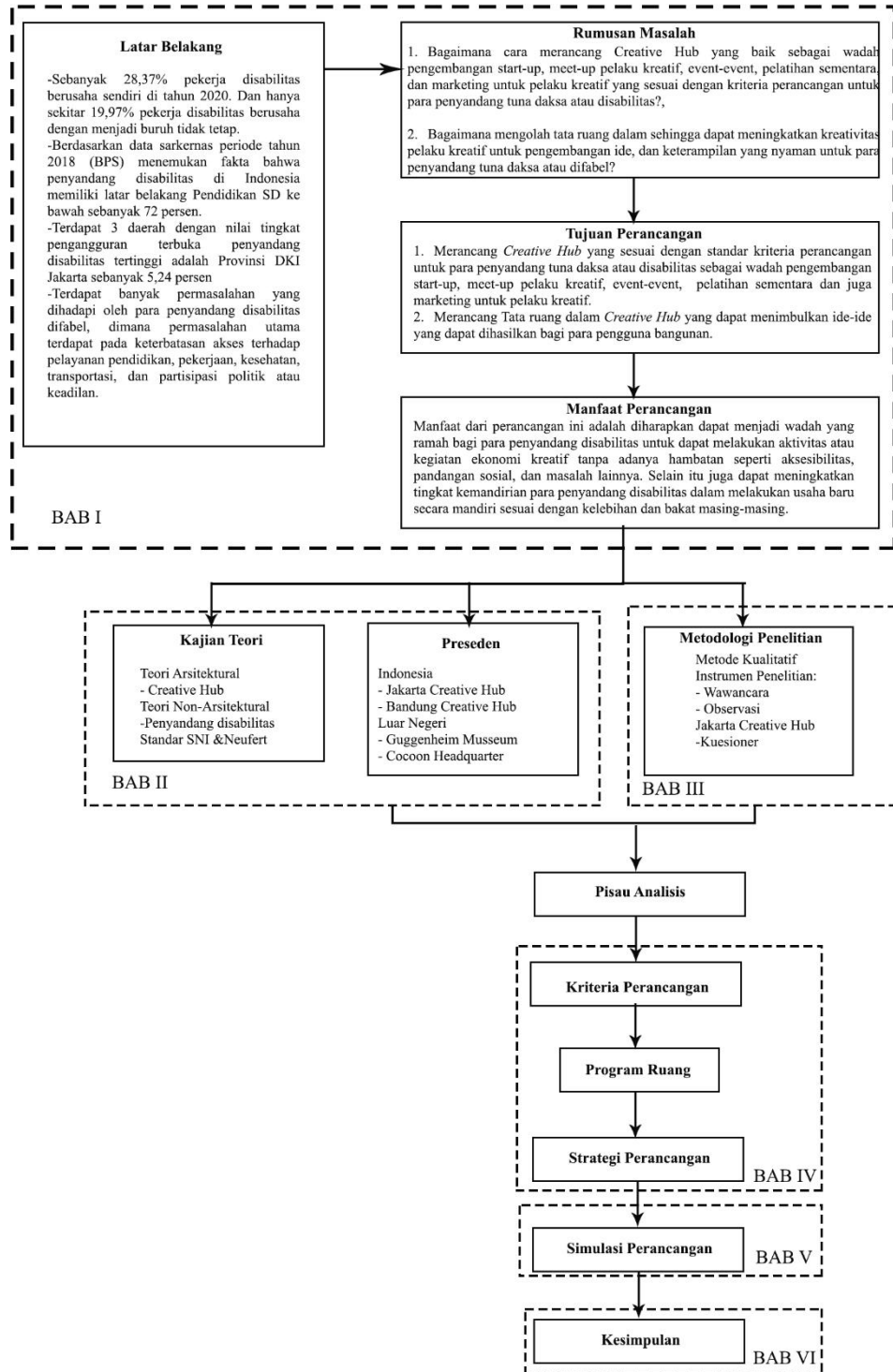


Diagram 1. Kerangka Berpikir